

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah atau desentralisasi pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan kewajiban pemda untuk mengendalikan daerahnya dengan tetap mengikuti aturan dan Undang-undang yang berlaku. Menurut Sukarna (2013) kekuasaan daerah otonomi sangat luas karena pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya yang terdiri dari bidang pendidikan, pertanian, kesejahteraan, kesehatan, perekonomian dan lain-lain. Berbeda halnya dengan pemerintah pusat hanya menangani beberapa kewenangan birokrasi luar negeri seperti keamanan, ketertiban, keuangan nasional, pertahanan, dan agama.

Desentralisasi mengakibatkan pemerintah daerah harus mampu untuk meningkatkan sumber daya daerahnya (Basri, 2012). Potensi daerah dapat ditingkatkan melalui peningkatan anggaran belanja daerah. Menurut Halim (2014) Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Menurut Felix (2012) Belanja Modal yang di anggarkan mengakibatkan peningkatan Belanja Modal dalam kaitannya penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik.

Pelaksanaan desentralisasi memberikan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah (Sukarna, 2013). Dengan adanya pemberian otonomi daerah memberikan pemahaman bahwa setiap daerah diharuskan sanggup memenuhi kebutuhan

semua kegiatan pelayanan, pembangunan infrastruktur dan penyediaan publik fasilitas yang menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diarahkan untuk bisa dalam mengelola penerimaan daerahnya sendiri yang ditunjukkan untuk pembangunan perekonomian daerah. Peningkatan desentralisasi berkaitan dengan bagaimana daerah mampu dalam menggali penerimaan atau pemasukan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagian dari pemasukan daerah yang digali dari sumber daya yang tersedia di daerah yang tidak termasuk dana perimbangan dan penerimaan lainnya. Mbedzi, Edson and Gondo (2010) menemukan Sumber pendapatan utama untuk daerah yang meliputi pajak, retribusi dan hasil perusahaan milik daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

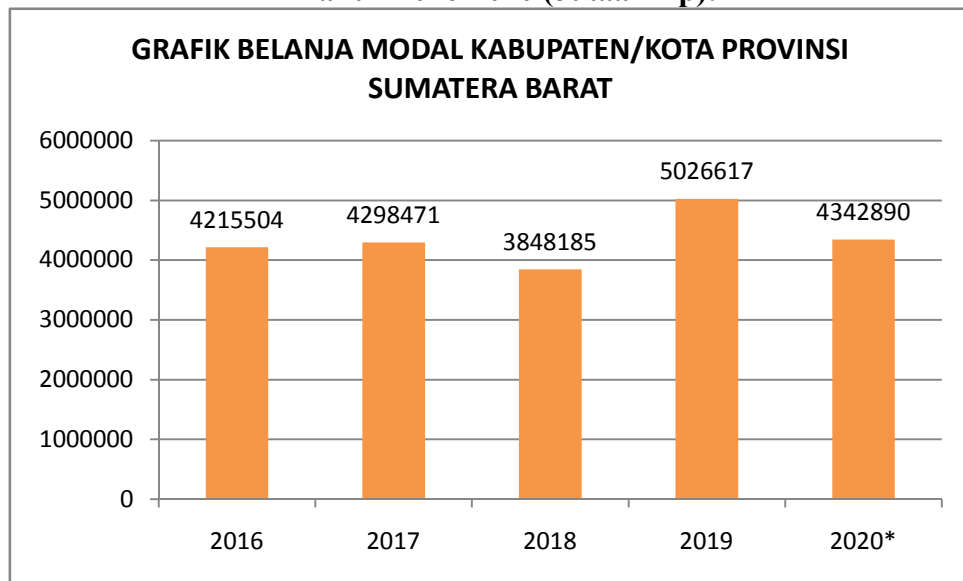
Nani and Vitor (2012) menemukan bahwa pendapatan daerah dan Belanja Modal saling mempengaruhi satu sama lain yang berarti bahwa perubahan dalam pendapatan daerah dapat mengakibatkan perubahan Belanja Modal. Menurut Venkataraman and Urmi (2017) Menemukan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, penerimaan daerah yang berupa PAD memiliki dampak positif kepada Belanja Modal pada bidang pembangunan daerah.

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia secara formal dimulai dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan perimbangan finansial mengatur pendanaan dari pusat ke pemda. Desentralisasi fiskal adalah cara untuk meningkatkan kinerja ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Sukarna, 2013). Masing-masing daerah memiliki kesanggupan keuangan yang berbeda dalam mendanai aktivitas-aktivitas pemerintahannya, terutama dalam pengelolaan

Pendapatan Asli Daerahnya. Perbedaan kemampuan keuangan di setiap daerah dapat menyebabkan ketimpangan keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kebijakan desentralisasi fiskal bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu kebutuhan pemerintah daerah melalui pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Alokasi finansial dari pusat ke pemda diantaranya Dana Alokasi Umum yang diberikan untuk memberikan manfaat finansial yang merata seragam dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Sukarna (2013) Dana Alokasi Umum pemberian dananya dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang didapatkan dari selisih kebutuhan daerah dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Pemberian Dana Alokasi Umum untuk daerah yang memiliki keuangan yang mencukupi namun keperluan keuangannya kecil maka mendapatkan anggaran Dana Alokasi Umum yang kecil, begitu juga sebaliknya. Pemerintah pusat memiliki program untuk mengurangi ketimpangan daerah berupa Dana Alokasi Khusus yang didapatkan melalui Penerimaan APBN yang diberikan untuk daerah terpilih yang bertujuan untuk membiayai keperluan daerah yang seragam dengan program nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Penggunaan anggaran DAK ditujukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang dan termasuk dalam pengeluaran Belanja Modal (Sukarna, 2013).

Grafik 1.1
Total Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Dari Tahun 2016-2020 (Jutaan Rp):



Sumber : BPS Sumbar, (2015-2020), diolah

Berdasarkan Grafik 1.1 menampilkan Belanja Modal dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masing-masing tahunnya terjadi kenaikan serta terdapat pula sebagian tahun belanja modal hadapi penyusutan seperti yang di lihat pada tahun 2018 dan 2020 terjadi penyusutan.

Penerimaan daerah diantaranya PAD, DAU dan DAK diperuntukkan pemda untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat melalui fasilitas publik yang nantinya akan meningkatkan Belanja Modal. Meningkatnya perekonomian daerah disertai dengan penerimaan daerah yang meningkat, seharusnya dapat meningkatkan Belanja Modal (Adyatama dan Rahmawati, 2015).

Berdasarkan penelitian Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal sebelumnya, Gounder et al. (2007) menemukan PAD positif terhadap Belanja Modal sedangkan V Sebastiana dan Cahyo (2016), Nurlis (2016) menemukan bahwa PAD negatif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan penelitian Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal sebelumnya, Sumarsono dan Rahmawati

(2017), Abdillah and Mursinto (2016) menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Nurlis (2016) menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil temuan, sehingga menjadi celah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas bagaimana penerimaan daerah yang diantaranya PAD, DAU dan DAK mempengaruhi Belanja Modal. penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat karena berdasarkan Belanja Modal pada daerah diantaranya 7 kota dan 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tidak merata yang menyebabkan adanya perbedaan pelayanan dan fasilitas publik di masing-masing kabupaten atau kota dan dari beberapa jurnal yang penulis temukan, belum ada yang mengaitkan dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Makanya penulis mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pengembangan Ilmu mengenai belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
2. Pengambilan kebijakan yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Para peneliti berikutnya yang membahas Pengaruh Pendapatan asli Daerah, dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
4. Bagi penulis sendiri, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang.